

PENGANGGARAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PRODAMAS) KOTA KEDIRI

BUDGET OF EMPOWER PROGRAM COMMUNITY (PRODAMAS) KEDIRI CITY

Oleh: Novie Astuti Setianingsih
Politeknik Kediri
viacoll77@gmail.com

Info artikel

Riwayat artikel

Penyerahan Januari 2018

Diterima Maret 2018

Diterbitkan April 2018

Kata kunci: Penganggaran kegiatan masyarakat, Prodamas

Abstrak

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) adalah suatu program dari pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT) sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.

Dari penelitian diperoleh nilai koefisien b_1 adalah sebesar 0,247 dengan signifikan 0,157 ($p < 0,05$), berarti Kelurahan berpengaruh positif terhadap rencana anggaran biaya Prodamas. Nilai koefisien b_2 adalah sebesar 0,659 dengan signifikan 0,125 ($p < 0,05$), berarti PPTK berpengaruh positif terhadap rencana anggaran biaya Prodamas. Nilai koefisien b_3 adalah sebesar 0,548 dengan signifikan 0,183 ($p < 0,05$), berarti Pendamping berpengaruh positif terhadap rencana anggaran biaya Prodamas. Nilai koefisien b_4 adalah sebesar 0,409 dengan signifikan 0,052 ($p < 0,05$), berarti warga RT/RW berpengaruh positif terhadap rencana anggaran biaya Prodamas.

Abstract

The Community Empowerment Facilitation Program (PRODAMAS) is a program of Kediri government that is used to carry out community development activities at village level based in Rukun Tetangga (RT) as an effort to realize the ability and independence of society in infrastructure

development, economic improvement of society, and social .

From the research, the coefficient value b_1 is 0.247 with significant 0,157 ($p < 0,05$), meaning Kelurahan have positive effect to cost budget plan of Prodamas. The value of coefficient b_2 is 0.659 with significant 0,125 ($p < 0,05$), mean PPTK have positive effect to cost budget plan of Prodamas. The value of b_3 coefficient is 0.548 with significant 0,183 ($p < 0,05$), meaning that the companion has positive effect to cost budget plan of Prodamas. The value of coefficient b_4 is 0.409 with significant 0.052 ($p < 0.05$), meaning that the residents of RT / RW have a positive effect on the budget plan of Prodamas.

PENDAHULUAN

Sebagaimana amanat Otonomi Daerah, pada Bulan Oktober Tahun 2002 status Tinalan sebelumnya adalah desa lalu berubah menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Kelurahan Tinalan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang terbagi menjadi 2 (dua) wilayah yaitu : Krajan Tinalan dan Lingkungan Dadapan.

Krajan Tinalan merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kelurahan Bangsal di bagian Utara, Kelurahan Tosaren di bagian Selatan, Kelurahan Banaran di bagian Timur dan Kelurahan Pakunden di bagian Barat. Sedangkan Lingkungan Dadapan merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kelurahan Jamsaren di bagian Utara, Kelurahan Betet di bagian Selatan, Kelurahan Bawang di bagian Timur dan Kelurahan Betet di bagian Barat.

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran menjadi topik hangat berbagai negara, terutama pada satu dekade terakhir. Beberapa negara maupun daerah tersebut sedang berusaha untuk memperoleh jalan keluar terutama fiskal, sebagai solusi penerapan anggaran, peningkatan pelayanan,

dan pembangunan (Ebdon dan Franklin, 2006). Di Indonesia, setelah muncul amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran menjadi sebuah keharusan sebagai salah satu komponen pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga dalam konteks penganggaran pada akuntansi sektor publik, partisipasi masyarakat dalam penganggaran merupakan salah satu hal yang sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran merupakan sebuah proses demokrasi dalam pembuatan kebijakan yang mana pemerintah mengundang warga untuk dapat memberikan masukan selama proses penganggaran, dan memungkinkan pengaruh mereka dalam pengalokasian anggaran (Zhang, 2009). Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai adanya kontribusi masyarakat dalam lahirnya sebuah kebijakan publik (Sopannah, 2014). Terkait keterlibatan masyarakat dalam penganggaran, hal ini harus dilakukan di setiap tahapan dalam siklus penganggaran, yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002).

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran merupakan kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah (Sisk, 2002), karena dapat meningkatkan tanggung jawab peme-

rintah melalui keterlibatan mereka (Ljungholm, 2015), memperkuat pengawasan anggaran (Sopannah, 2005), juga sebagai bentuk penyampaian aspirasi melalui mekanisme yang tepat. Hal ini menjadi alasan tepat bagi masyarakat untuk dapat membantu pemerintah dalam menentukan solusi terbaik bagi keduanya. Dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan yang dibuat dapat lebih realistis (Ljungholm, 2015). Callahan (2002) dan Ebdon (2002) menegaskan bahwa adanya partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat demokratisasi. Agar terlaksananya kebijakan pemerintah perlu adanya dukungan warga. Adanya keterlibatan masyarakat dalam penganggaran menyebabkan diketahuinya usulan dan keinginan masyarakat secara jelas dan efisien, serta dapat dijadikan acuan dalam peningkatan *trust* dari masyarakat. *Trust* adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penelitian terkait partisipasi masyarakat diantaranya mulai dilakukan oleh Ebdon (2002), yang mana telah mengeksplorasi dampak dari partisipasi masyarakat dalam anggaran di beberapa kota di Nebraska. Ebdon menemukan bahwa partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi keputusan anggaran pada suatu daerah. Ebdon dan Franklin (2004) melanjutkan penelitiannya tentang hal ini, yang mana rata-rata kota pada waktu itu masih mencari sebuah mekanisme yang tepat untuk partisipasi masyarakat dalam penganggaran. Ebdon dan Franklin (2006) menindak lanjutinya dan mengemukakan bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) elemen kunci yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penganggaran, diantaranya adalah kondisi lingkungan daerah, desain proses, mekanisme, serta capaian target dan hasil yang telah dikeluarkan.

Becket (2002) juga menekankan akan pentingnya partisipasi masyarakat, sehingga teknik dan strategi dalam menjaring

aspirasi, kontribusi dan partisipasi masyarakat menjadi hal yang menentukan keberhasilan serta dapat memperkuat kontribusi masyarakat dalam keputusan anggaran serta kebijakan sebuah daerah. Marlowe dan Portilo (2006) kemudian menekankan pentingnya faktor demografi dan kelembagaan dalam mempengaruhi persepsi pemerintah daerah dalam keterlibatan warga. Herian (2011) juga memberikan sumbangsih bahwa variabel politik, ekonomi dan kelembagaan memberikan pengaruh dominan terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam sebuah daerah. Dengan adanya otonomi, sebuah daerah tertentu dapat menggunakan berbagai metode dan aturan main yang mengatur tentang mekanisme keterlibatan warganya dalam penganggaran. Terlebih program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di kota Kediri ini awalnya adalah sebuah kontrak politik antara Calon Walikota dengan masyarakat, sehingga setelah menjadi Kepala Daerah, program ini dilaksanakan sebagai tanggung jawab beliau dan menjadi program unggulan.

Sopannah dan Wahyudi (2005) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran waktu itu masih sangat rendah sehingga menyebabkan terjadinya distorsi dalam penyusunan APBD. Kemudian Sopannah (2008; 2009) menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pada waktu itu mulai munculnya strategi Kepala Daerah untuk mengadakan kontrak kerja atau janji politik terhadap masyarakat. Hal ini yang kemudian berdampak signifikan terhadap adanya peningkatan partisipasi masyarakat.

Rencana kerja pemerintah daerah dapat mencapai keberhasilan programnya apabila terdapat sinergi antara masyarakat dengan pemerintah terwujud dengan baik. Suatu program kebijakan akan mustahil dapat berjalan apabila tanpa ada partisipasi masyarakat didalamnya. Partisipasi masya-

rakat merupakan faktor penentu sekaligus sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program – program pembangunan, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh jika program – program dalam pembangunan memang benar – benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian Kogaya, dkk (2015) dikatakan bahwa konsep pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat memberikan beberapa keuntungan salah satunya adalah peranan pemerintah atau organisasi non pemerintah hanya sebatas fasilitator, sedangkan inisiatif berasal dari masyarakat.

Seberapapun kerasnya usaha pemerintah membangun, jika tidak melibatkan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dan tidak didukung oleh masyarakat maka tingkat keberhasilan pembangunan serta keberlanjutan program pembangunan akan berbeda dengan kondisi jika masyarakat ikut terlibat berpartisipasi. Keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan sangat diperlukan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan sangat diperlukan, sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring pembangunan. Dalam hal ini masyarakat perlu dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya.

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya dapat dinyatakan dengan pertanyaan riset berikut ini: Apakah dalam program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) kota Kediri, masyarakat Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren berpartisipasi dalam perencanaan anggaran program fasilitasi

Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren, khususnya pada RW 1 sampai dengan RW 6?

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan prodamas setiap RT sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) per tahun dan dialokasikan melalui Belanja Langsung yang dituangkan melalui Belanja Langsung yang dituangkan dalam kode rekening belanja program dan kegiatan dalam RKA/DPA SKPD kelurahan yang terinci per-RT dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya umum di tingkat RT setinggi-tingginya 1% (satu persen) dari pagu dana Prodamas untuk mendukung administrasi pelaksanaan Prodamas
- b. Biaya kegiatan meliputi:
 1. Bidang infrastruktur/lingkungan
Digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana umum minimal 60% (enam puluh persen) dari pagu dana Prodamas dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai yaitu sebagai berikut:
 - Jembatan kecil/gorong-gorong
 - Pengerasan jalan skala kecil
 - Semenisasi jalan gang/lorong
 - Pembuatan dan atau perbaikan selokan/drainase lingkungan (parit)
 - Perbaikan sarana lingkungan (gang)
 - Pembuatan posyandu yang pembiayaannya dapat dilaksanakan secara terpadu antara RT apabila jumlah minimum 50 balita dalam satu wilayah RT
 - Pengadaan peralatan posyandu (meja, kursi, timbangan bayi)
 - Pembuatan pos kampling lingkungan
 - Pembuatan taman di lingkungan RT

- Pengadaan bak sampah
- Pembuatan/pengadaan sampah
- Pembuatan dan atau pemeliharaan MCK umum
- Pembungan jaringan air bersih skala kecil
- Pembuatan sarana dan prasarana olah raga skala kecil
- Pembuatan penerangan jalan gang skala kecil
- Pembuatan sumur biopori
- Pembuatan sumur resapan air dalam skala kecil
- Pembangunan/rehap sarana prasarana peribadatan
- Pembangunan lain dalam bentuk skala kecil

Pengecualian dari ketentuan minimal 60% bagi kegiatan bidang infrastruktur adalah untuk lingkungan RT yang sarana dan prasarana infrastrukturnya telah terpenuhi.

2. Bidang ekonomi

Kegiatan bidang ekonomi digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi untuk kelompok usaha bersama dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai, yaitu:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi kerakyatan
- b. Pelatihan berbagai jenis keterampilan usaha dalam skala kecil
- c. Pengadaan bibit tanaman sayuran dan palawija, bibit ternak dan benih ikan dalam skala kecil
- d. Lain-lain dalam bentuk skala kecil

3. Bidang sosial

Kegiatan bidang sosial digunakan untuk penyelesaian permasalahan sosial dan peralatan pendukung

kegiatan sosial di masyarakat dalam skala kecil dan non bantuan langsung tunai, yaitu:

- a. Pemberian santunan bantuan makanan kepada penduduk miskin lanjut usia dalam skala kecil
- b. Peralatan kegiatan seni dan budaya lokal dalam skala kecil
- c. Peralatan kegiatan bulan bakti gotong-royong masyarakat ditingkat RT
- d. Peralatan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional (PHBN) ditingkat Rt
- e. Peralatan kegiatan pertemuan-pertemuan ditingkat RT
- f. Peralatan lain-lain dalam bentuk skala kecil

4. Bidang Operasional

- a. Biaya operasional untuk kegiatan Prodamas di kelurahan dialokasikan anggaran tersendiri di masing-masing SKPD kelurahan
- b. Biaya operasional untuk Tim Koordinasi Prodamas tingkat kecamatan dialokasikan anggaran tersebut di masing-masing SKPD kecamatan
- c. Biaya operasional untuk tim koordinasi Prodamas tingkat Kota dan tenaga pendamping dialokasikan anggaran tersendiri pada SKPD kantor pemberdayaan masyarakat
- d. Besaran alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud ditentukan sebagai berikut:
 - o Untuk kelurahan se-Kota Kediri maksimal 5,5% (lima koma lima persen)

- dari pagu anggaran Prodamos se-Kota Kediri
- Untuk tingkat kecamatan maksimal 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari pagu anggaran Prodamos di masing-masing kecamatan
- Untuk tingkat kota maksimal 1,5% (satu koma lima persen) dari pagu anggaran Prodamos se-Kota Kediri

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, karena bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendapat data lengkap serta lebih valid mengenai Partisipasi masyarakat dalam Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Prodamos) Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Penelitian ini dikhususkan pada RT: 1 sampai dengan RW: 6 Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Dalam menetapkan si informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui dan mengalami atau bagian dari kelompok sasaran, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan dan dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Alat pengukurannya memakai skala likers. Kuesioner akan didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden. Peneliti mengambil populasi

di 6 RW dengan alasan bahwa sudah memenuhi kriteria sebagai sampel.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2017 sampai 15 September 2017 dan tempatnya di Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri.

Target/Subjek Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah warga RW 1 sampai dengan RW 6 dan pegawai kelurahan Tinalan yang dalam hal ini yang ditugaskan untuk melaksanakan Prodamos. Kuesioner akan didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden. Peneliti mengambil populasi di 6 RW dengan alasan bahwa sudah memenuhi kriteria sebagai sampel.

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan rencana penganggaran Program Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Tinalan. Pemilihan lokasi dan responden dalam penelitian yang dilakukan untuk tujuan tertentu saja (*adjustment sampling*) di wilayah Kota Kediri dengan pertimbangan bahwa kelurahan Tinalan

Prosedur

Prosedur perlu dijabarkan menurut tipe penelitiannya. Bagaimana penelitian dilakukan dan data akan diperoleh, perlu diuraikan dalam bagian ini.

Untuk penelitian eksperimental, jenis rancangan (*experimental design*) yang digunakan sebaiknya dituliskan di bagian ini.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dari kuesioner yang disebarikan sebagai data bisa ditabelkan di bawah ini.

TABEL 1. KOMPOSISI JUMLAH SAMPEL

No.	Wilayah	Distribusi Kuesioner	Kuesioner Kembali
1	Warga RW 1 RT 1	5	5
2	Warga RW 1 RT 2	5	5
3	Warga RW 2 RT 1	5	2
4	Warga RW 2 RT 2	5	0
5	Warga RW 2 RT 3	5	0
6	Warga RW 2 RT 4	5	0
7	Warga RW 3 RT 1	5	5
8	Warga RW 3 RT 2	5	5
9	Warga RW 3 RT 3	5	5
10	Warga RW 3 RT 4	5	5
11	Warga RW 4 RT 1	5	4
12	Warga RW 4 RT 2	5	3
13	Warga RW 5 RT 1	5	5
14	Warga RW 5 RT 2	5	5
15	Warga RW 6 RT 1	5	5
16	Warga RW 6 RT 2	5	2
17	Warga RW 6 RT 3	5	4
18	Warga RW 6 RT 4	5	3
19	Pegawai Kelurahan	16	14
20	PPTK	2	2
21	Pendamping	2	2
	Jumlah kuesioner yang didistribusikan	100	81

Teknik Analisis Data

Bagaimana memaknakan data yang diperoleh, kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian, perlu dijabarkan dengan jelas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TABEL 2. UJI t DARI DATA SPSS 17.0

Model		T	Sig.
1	(Constant)	.123	.902
	Kelurahan	1.168	.157
	PPTK	.443	.125
	Pendamping	.605	.183
	warga	.832	.052

a. Dependent Variable: rab

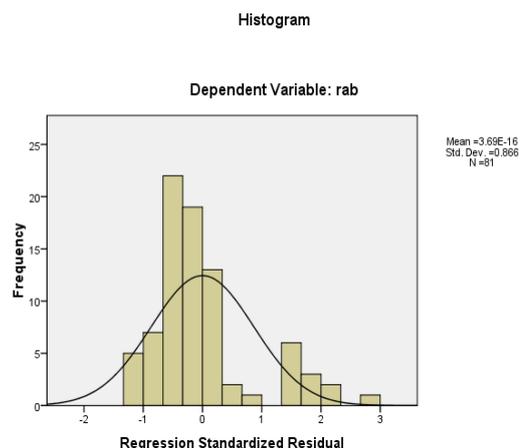
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Variabel kelurahan memiliki nilai $t = 1,168$ lebih besar dari t tabel yaitu $1,168 > 0,123$ dengan nilai p -value

sebesar $0,157$ diterima pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$). Nilai positif menunjukkan pengaruh positif. Artinya kelurahan berpengaruh terhadap rencana anggaran biaya Prodams dan $H1$ dinyatakan diterima.

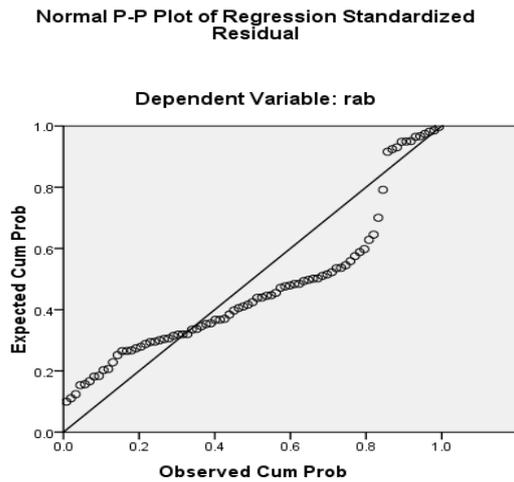
Variabel PPTK memiliki nilai $t = 0,443$ lebih besar dari t tabel sebesar $0,123$ yaitu $0,443 > 0,123$ atau nilai p value sebesar $0,125$ diterima pada taraf signifikansi 5% ($P > 0,05$). Artinya PPTK berpengaruh terhadap rencana penganggaran biaya Prodams dan $H2$ dinyatakan diterima.

Variabel Pendamping memiliki nilai $t = 0,605$ lebih besar dari t tabel sebesar $0,123$ yaitu $0,605 > 0,123$ atau nilai p -value sebesar $0,183$ diterima pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$). Artinya Pendamping berpengaruh terhadap rencana penganggaran biaya Prodams dan $H3$ dinyatakan diterima.

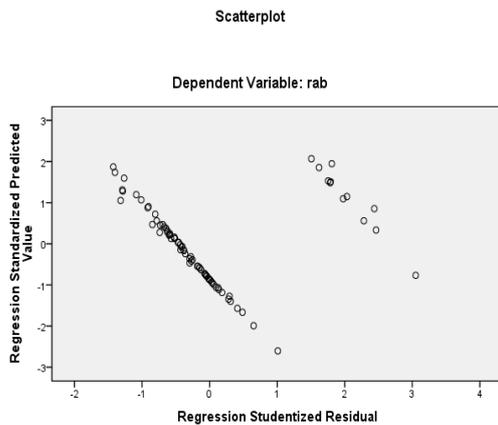
Variabel warga RT/RW memiliki nilai $t = 0,832$ lebih besar dari t tabel sebesar $0,123$ yaitu $0,832 > 0,123$ atau nilai p -value sebesar $0,052$ diterima pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$). Artinya Warga RT/RW berpengaruh terhadap rencana penganggaran biaya Prodams dan $H4$ dinyatakan diterima.



GAMBAR 1. UJI NORMALITAS



GAMBAR 2. UJI MULTICOLLINEARITY



GAMBAR 3. UJI ASUMSI HETEROS KEDASTISITAS

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis data pengujian hipotesis penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kelurahan, PPTK, Pendamping dan warga RT/RW mempengaruhi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Prodamas. Dengan adanya dukungan dari pegawai kelurahan Tinalan, PPTK kelurahan Tinalan, Pendamping kelurahan Tinalan dan Warga RT/RW kelurahan Tinalan maka rencana penganggaran biaya Prodamas bisa tersusun dan pelaksanaan Prodamas di kelurahan Tinalan bisa berjalan lancar.

Dalam penelitian partisipasi masyarakat dalam rencana penganggaran program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) ini dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat sangat mendukung terlaksananya program pemberdayaan masyarakat ini karena masyarakat sendiri yang tahu apa yang dibutuhkan sehingga penggunaan APBD lebih efisien dan tepat sasaran terutama untuk masyarakat miskin. Program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) ini juga sebagai program untuk memberdayakan masyarakat setempat agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) ini dalam pemakaian anggarannya di rencanakan oleh masyarakat, dalam pelaksanaan dilaksanakana oleh masyarakat dan diawasi oleh masyarakat juga. Sehingga program ini bersifat transparan, siapa saja boleh mengawasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) ini.

Dengan adanya Prodamas perekonomian warga kelurahan Tinalan bisa meningkat karena adanya bantuan untuk warga miskin, pembangunan dan perbaikan infrastruktur di kelurahan Tinalan sehingga mempermudah mobilisasi warga kelurahan Tinalan. Dan untuk pembelian material yang diperlukan untuk Prodamas dibelikan dari toko yang berada di wilayah kelurahan Tinalan sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga keluraha Tinalan sendiri. Sehingga perputaran perekonomian di kelurahan Tinalan bisa lebih meningkat lagi.

Saran

Penelitian ini selanjutnya dapat menambah variabel lain tidak terbatas pada faktor kelurahan, PPTK, Pendamping, warga RT/RW dalam satu kelurahan saja tetapi bisa di perluas lagi wilayahnya menjadi satu Kota Kediri. Perlu sampel yang lebih banyak lagi dan tidak terbatas pada RT, RW dan kelurahan saja. Dan perlu

pengembangan instrumen yaitu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari obyek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, 2009, Pengaruh Implementasi Sstem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Pemda di Jawa Tengah), Jurnal Akuntansi & Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Abdul Halim, 2002, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, Yogyakarta: Seri bunga rampai
- Amason A. C dan D. M Schwigner (1994), *Resolving the paradox of conflict, strategy decision making and organization performance, International journal of conflict management*
- Harmoni Media Informasi Pemerintahan Kota Kediri, 2017, Pemkot Kediri Terapkan SOTK Baru, Vol 1 Edisi 1/2017
- Prodamas, 2015, Buku Saku Program Pemberdayaan Masyarakat, Kota Kediri Peaturan Walikota Kediri, 2015, Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemerdayaan Masyarakat (Prodamas), Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri
- Perwali Nomor 40 Tahun 2014 Kota Kediri
- Perwali Nomor 52 Tahun 2014 Kota Kediri
- Perwali Nomor 19 Tahun 2015 Kota Kediri
- Perwali Nomor 2 Tahun 2016 Kota Kediri